

ANALISIS KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA **(STUDI KEPUSTAKAAN STATUS KEPEMILIKAN KRIMEA)**

Fransiskus Atok

Email : atokfrans@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Timor

ABSTRAK

Proses latihan militer Rusia di perbatasan Rusia dan Ukraina merupakan salah satu sikap politik yang dilakukan oleh pemerintah Rusia dalam menanggapi konflik internasional yang telah berlangsung lama, upaya untuk menanamkan pengaruh Rusia ke Ukraina yang berhasil sebelum akhirnya gagal di Tahun 2014 merupakan upaya untuk menyatukan kembali bekas Uni Soviet. Kebijakan ini lebih lanjut dengan melihat fakta sejarah bahwa ibu kota Ukraina memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rusia saat ini, di mana suku Slavia pertama (nenek moyang Rusia) berasal dari kota Kiev. Tujuan penulisan yakni mengetahui dan menganalisis faktor penyebab dan dampak dari konflik Rusia dan Ukraina. Berbagai upaya telah dilakukan Rusia untuk memperkuat pengaruhnya di Ukraina, mulai dari upaya diplomatik, bantuan ekonomi, hingga menyatukan kembali Ukraina melalui Krimea. Namun, hal ini justru menimbulkan berbagai konflik, baik di dalam negara Ukraina maupun konflik internasional. Kebijakan politik ini semakin diperparah dengan keterlibatan Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa dalam konflik tersebut. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan, dimana metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada. Metode studi kepustakaan digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Kata kunci: Konflik, Ukraina, Rusia, Krimea, Uni Eropa

PENDAHULUAN

Krisis ini bermula pada November 2013 ketika Presiden Ukraina pada saat itu Victor Yanukovich menolak untuk menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan lebih memilih untuk menerima bantuan dari Federasi Rusia berupa pinjaman sebesar 15 miliar dolar AS dan potongan harga gas dari Rusia sebesar 30%. Kebijakan tersebut menyebabkan protes besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Ukraina. Kestabilan politik Ukraina juga semakin memburuk dengan adanya kecenderungan sikap masyarakat Ukraina Barat yang berbeda dengan Ukraina Timur. Karena ketidakmampuan pemerintah kala itu dalam menjaga kestabilan negara maka, presiden Ukraina Victor Yanukovich resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan sementara oleh Presiden Olexander Turchnyov lalu pada tahun 2015 digantikan lagi oleh Presiden Petro Poroshenco yang kemudian terbentuklah sebuah pemerintahan baru di Ukraina yang pro Uni Eropa. Kecenderungan tersebut menyebabkan Keamanan negara Federasi

Rusia merasa terancam dengan adanya intervensi Uni Eropa dan Amerika Serikat yang tergabung dalam organisasi NATO. Sebagai upaya diplomasi pemerintah Rusia telah mengirimkan surat tuntutan kepada NATO, salah satu poin penting yang ingin disampaikan adalah menolak ide bergabungnya Ukraina kedalam organisasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian studi kepustakaan, dimana metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studipenelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin diselesaikan. Metode studi kepustakaan digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

PEMBAHASAN

Kronologi Konflik Ukraina-Rusia

Krisis ini bermula pada November 2013 ketika Presiden Ukraina pada saat itu Victor Yanukovich menolak untuk menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan lebih memilih untuk menerima bantuan dari Rusia berupa pinjaman sebesar 15 miliar dolar AS dan potongan harga gas dari Rusia sebesar 30 persen.

Keputusan Yanukovich tersebut kemudian menuai protes dari masyarakat Ukraina yang pro Barat, protes tersebut berlangsung di Kiev dan terus berlanjut hingga tahun 2014. Seiring berjalannya waktu aksi tersebut berubah menjadi protes yang menggunakan kekerasan dan menyebabkan terbunuhnya puluhan demonstran dan ratusan orang mengalami dampak yang cukup signifikan. Berbagai upaya mediasi telah dilakukan, kesepakatan pembagian daerah kekuasaan dalam pemerintah Ukraina juga melibatkan beberapa mediator dari negara-negara di Eropa, antara lain Menteri Luar Negeri Prancis, Jerman dan Polandia. Tercapainya kesepakatan pembagian kekuasaan di Ukraina pada Februari 2014 nyatanya konflik sipil di Ukraina terus berlanjut.

Konflik menjadi semakin memanas karena Presiden Ukraina, Victor Yanukovich menghilang dari Kiev dan disusul dengan perilaku arogan para demonstran di beberapa Gedung pemerintahan Ukraina. Victor Yanukovich resmi turun dari jabatannya digantikan sementara oleh Presiden Olexander Turchnyov dan pada tahun 2015 lalu digantikan lagi oleh Presiden Petro Poroshenco yang kemudian terbentuklah sebuah pemerintahan baru di Ukraina yang pro Uni Eropa. Beralihnya kecenderungan politik Ukraina membuat Rusia menjadi semakin agresif karena usahanya untuk mendominasi Ukraina ternyata tidak berhasil.

Krisis Ukraina terkait masalah status Krimea juga berdampak pada sanksi Ekonomi bagi Rusia, sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika dan Eropa berupa pelarangan pengiriman produk pertanian dan perikanan, seperti buah-buahan, daging, susu, ikan dan berbagai produk olahan lainnya, investasi, pariwisata, transportasi, energi, migas bahkan hingga sumber daya mineral. Letak geografis Ukraina merupakan teritori yang sangat strategis dimana dalam

hal ini Ukraina berperan sebagai *buffer zone* atau yang lebih dikenal sebagai jalur pipa untuk penyaluran migas dari Rusia ke negara-negara di kawasan Eropa Barat. Berdasarkan data dari hampir dua per tiga penjualan gas Rusia ke Uni Eropa melalui pipa-pipa yang ditanam di bawah tanah Ukraina hal ini disepakati oleh Ukraina dan Rusia sebelum adanya konflik. Dampak dari krisis dua negara ini dirasakan juga oleh negara anggota Uni Eropa lainnya karena sikap politik pemerintah Rusia yang melakukan penutupan terhadap pasokan gas bagi negara-negara Uni Eropa yang menyebabkan krisis energi di Uni Eropa.

Perspektif Rusia dan Ukraina Terhadap Status Krimea.

Penggabungan Krimea ke Rusia adalah proses integrasi dari keseluruhan semenanjung Krimea yang dilaksanakan pada tahun 2014. Banyak negara barat menentang hal tersebut dan menyebutnya sebagai aneksasi atau agresi wilayah Krimea adalah hasil intervensi dari Rusia. Sejak tanggal 21 Maret 2014 Rusia memerintah Krimea sebagai dua subjek federal yaitu Republik Krimea dan kota Federal Sevastopol. Menurut Undang-undang Rusia, bergabungnya subyek- subyek federal baru diatur oleh undang-undang konstitusi federal pasal 65 ayat 2. Undang-undang ini diterima pada tahun 2001, dan menjelaskan bahwa bergabungnya sebuah negara baru atau bagian dari negara tersebut ke Rusia, akan berdasarkan kesepakatan bersama antara Federasi Rusia dan negara yang bersangkutan serta akan berlangsung sesuai dengan kesepakatan internasional antara dua negara. Selain itu, hal ini harus diawali oleh negara yang bersangkutan, bukan oleh suatu bagiannya atau oleh Rusia. Undang-undang ini mewajibkan Republik Krimea untuk memulai negosiasi bersangkutan dengan penggabungan Krimea ke Rusia. Atas alasan inilah Presiden Putin bersikeras akan mempertahankan Krimea dari Ukraina dan Barat.

Presiden Putin membantah tuduhan dari PBB akan keterlibatan Rusia dalam konflik di Ukraina, berlandaskan upaya untuk melindungi warga negaranya di Ukraina dan etnis Rusia yang ada di Krimea dari ancaman warga dan militer Ukraina. Perlahan tapi pasti akhirnya Krimea mengadakan referendum

yang hasilnya 97,8% warga Krimea memilih untuk bergabung ke Rusia, di sisi lain Rusia mengecam keras bahwa proses integrasi ini dicap sebagai penganeksasian, karena hal ini menghina penduduk Semenanjung Krimea, dan menganggap proses ini sebagai integrasi Republik Krimea yang merdeka setelah Krimea dan Sevastopol bergabung dan meminta izin untuk masuk ke Rusia sesuai dengan pemilihan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, yang menurut pendapat Rusia mencerminkan keinginan rakyat bergabung dengan negara yang lebih besar. Akan tetapi Ukraina membantah hal ini, karena Ukraina tidak mengakui kemerdekaan Republik Krimea atau integrasi tersebut dengan Rusia sebagai hal yang sah secara hukum. Sidang Umum PBB juga menolak referendum Krimea dan menyatakan Krimea masuk dalam kategori penganeksasian oleh Rusia, PBB juga menyetujui sebuah resolusi yang tidak mengikat yang menekankan keutuhan wilayah Ukraina sesuai dengan perbatasan-perbatasannya yang telah diakui secara hukum internasional.

Selain itu Ukraina mengkritisi Undang-Undang Rusia pasal 65 ayat 2 dimana dalam Undang-undang tersebut berbunyi, “bergabungnya subyek-subyek federal baru diatur oleh undang-undang konstitusi negara federal.” Undang-undang ini menjabarkan bahwa bergabungnya sebuah negara baru atau bagian dari negara tersebut ke Rusia, akan berdasarkan kesepakatan bersama antara Federasi Rusia dan negara yang bersangkutan serta akan berlangsung sesuai dengan kesepakatan internasional antara dua negara. Selain itu, hal ini harus diawali oleh negara yang bersangkutan, bukan oleh suatu bagiannya atau oleh Rusia. Undang-undang ini nampaknya mewajibkan Ukraina untuk memulai negosiasi bersangkutan dengan penggabungan Krimea ke Rusia, bukan Krimea yang mengabaikan Ukraina sebagai negara induk dari kota Kiev.

Faktor lain yang membuat pemerintah Ukraina merasa yakin dan tidak mengakui Krimea sebagai bagian dari Rusia adalah Undang-Undang Ukraina Pasal 3, yang berbunyi perubahan wilayah hanya dapat disetujui melalui referendum yang diikuti oleh semua rakyat Ukraina, termasuk

mereka yang tidak tinggal di Krimea. Jadi dengan pengabungan dua undang-undang dari dua negara yang terlibat konflik tersebut maka jelaslah bahwa Krimea adalah bagian dari Ukraina.

Menurut hukum internasional cara penambahan wilayah yang di benarkan adalah dengan cara damai tanpa kekerasan. Piagam PBB pasal 2 ayat 4 dengan jelas menyatakan larangan untuk menambah wilayah dengan kekerasan. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut, dalam melaksanakan hubungan internasional, semua anggota harus mencegah tindakan-tindakan yang berupa ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan atau kemerdekaan negara lain.

Cara memperoleh yang dibenarkan oleh hukum internasional adalah okupasi (wilayah yang sebelumnya belum pernah menjadi bagian dari kedaulatan suatu bangsa) akresi (penambahan wilayah secara alamiah), prespeksi (memperoleh wilayah dengan cara okupasi secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama), cessi (penyerahan wilayah dengan suka rela atau paksaan karena perang), sedangkan aneksasi atau penaklukan (penggabungan suatu wilayah lain dengan paksaan atau paksaan kedalam wilayah yang menganaeksasi) tidak di benarkan.

Sedangkan referendum adalah cara memperoleh wilayah melalui pilihan penduduk yang bersangkutan. Referendum adalah cara damai dengan pemungutan suara oleh penduduk suatu wilayah. Dari penjabaran di atas jelas sekali bahwa Rusia tidak menganeksasi Krimea yang selama ini di tuduhkan, jika melihat piagam PBB maka seharusnya permasalahan ini tidak berlarut-larut, tetapi referendum yang dilakukan oleh penduduk Krimea tidak mendapat persetujuan dari negara induk yaitu Ukraina walaupun demikian untuk menekan Ukraina agar mau menjadi bagian Rusia dan menolak kesepakatan dengan Uni Eropa maka Krimea tetap diduduki demi kepentingan Rusia baik dari segi politik, ekonomi, keamanan dan ideologi, maka Disinilah konflik tersebut terus hingga saat ini.

Konsekuensi dari referendum Krimea yang tidak mendapat pengakuan dari banyak negara ini, menyebabkan Rusia

mendapatkan beberapa sanksi yakni sanksi ekonomi, dan sanksi politik dari berbagai negara seperti: Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Norwegia, Jepang, Ukraina, Georgia, Australia, dan Selandia Baru. Rusia menganggap pemerintah Ukraina menjadi penyebab tidak selesainya konflik di Ukraina Timur karena hanya ingin mengembalikan kontrol pemerintah tanpa memberikan hak otonomi yang telah dijanjikan sebelumnya. Sebaliknya Ukraina dan negara-negara Barat menuduh Rusia ikut campur di Ukraina Timur dan meminta segera menghentikan tindakannya sehingga masalah dapat diselesaikan. Rusia sendiri mengaku tidak ikut campur sama sekali, dan menekankan bahwa masalah harus diselesaikan melalui berbicara langsung dengan penduduk Ukraina Timur (setelah diberikannya hak otonomi khusus) mengingat bahwa hasil referendum yang mayoritas masyarakat di wilayah Ukraina Timur menginginkan bergabung kembali pada Federasi Rusia. Sanksi politik ini dimulai dari ketidakpercayaan dari setiap negara yang berkonflik terhadap vaksin covid-19, pengusiran diplomat Rusia dari beberapa negara di Eropa seperti: Jerman, Polandia, Ceko, dan Slovakia, dan juga penarikan duta besar Rusia di Amerika Serikat, dan begitupula sebaliknya terjadi penarikan duta besar Amerika Serikat untuk Rusia.

Rusia berpendapat bahwa sanksi sepihak tersebut merupakan langkah diplomatis yang bertujuan untuk melemahkan pengaruh politik Rusia di kawasan Eropa, sehingga dengan begitu akan lebih mudah bagi negara-negara pro barat untuk melakukan protes terhadap intervensi Rusia. Namun tak lama setelahnya Rusia menjawab sanksi tersebut dengan memberikan sanksi balasan berupa larangan bagi sebagian warga dan perusahaan-perusahaan negara di atas untuk memasuki wilayah Federasi Rusia, juga menghentikan impor produk makanan dari negara-negara tersebut. Hal ini tentunya semakin memperkeruh hubungan kedua belah pihak.

Meski langkah ini disanksikan banyak pihak, namun hal tersebut akan mendorong Eropa dan AS untuk menjatuhkan sanksi ekonomi berupa pembatasan atau pemblokiran ekspor

komoditas utama Rusia seperti aluminium, nikel, paladium, platinum, dan yang utama adalah migas. Kebijakan tersebut bisa saja terjadi karena material itu adalah produk utama serta pasokan penting bagi perusahaan produsen milik AS dan Eropa. Kehilangan sumber pasokan dunia yang penting akan mendorong kenaikan harga pasar. Namun hal itu bisaberdampak sebaliknya. Tak hanya buruk bagi Rusia tapi juga Eropa dan AS. Karena hal ini akan menyebabkan inflasi bagi Amerika Serikat (AS) dan banyak negara barat. Pasar minyak dan gas alam juga diyakini akan terguncang. Karena Rusia adalah produsen utama dari minyak dan gas di Eropa. Tetapi penutupan ekspor energi Rusia tidak mungkin terjadi karena Eropa terlalu bergantung pada energi Rusia sehingga hampir tidak mungkin bagi negara yang berada di Kawasan uni Eropa untuk memboikot atau bahkan memasukkannya ke dalam daftar sanksi ekonomi.

Sanksi lainya yang ditujukan Amerika dan Uni Eropa adalah sanksi kepada beberapa Bank Rusia dan juga perusahaan minyak Rosneft. Sanksi tersebut bertujuan untuk melarang semua perusahaan minyak dan mineral yang dikontrol negara untuk menerima dana dalam pasar modal Eropa. Akibatnya Rusia akan kehilangan sebagian pasarnya akibat sanksi tersebut, belum lagi dana lainya yang tersimpan di bank-bank Eropa. Hasil ekspor utama Rusia yang turun 50% menyebabkan turunnya kurs mata uang Rubel dengan sangat cepat di banding mata uang lainya, kejadian ini menyebabkan perlambatan ekonomi dan menyebabkan krisis keuangan di Rusia menjadi semakin parah.

Disisi lain Rusia juga membutuhkan pendapatan dari penjualan energi untuk mempertahankan ekonomi yang stagnan. Faktor tersebut akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi Rusia jika menghadapi sanksi baru sambil membiayai operasi militer besar. Apabila serangan ke Ukraina benar terjadi, maka hal tersebut mustahil dilakukan. Rusia akan tetap mengirim minyak dan gas ke Eropa bahkan jika perang dilakukan. Harga minyak dan gas pun kemungkinan akan melonjak. Karena kurangnya bahan baku ekspor, perusahaan minyak pun

diyakini akan menunda investasi untuk mengukur konflik, dan uang justru akan mengalir ke aset yang lebih aman, seperti surat berharga dan lain sebagainya, hal tersebut akan meningkatkan suku bunga, dan memperkuat dolar. Invasi penuh akan mengarahkan ekonomi Eropa ke dalam resesi. Hal ini juga akan berdampak pada pertumbuhan PDB AS.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi yang disampaikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu sikap politik pemerintah Rusia yang menempatkan ribuan pasukan militernya di sepanjang perbatasan Ukraina, merupakan konsekuensi dari memburuknya hubungan Rusia dengan negara-negara Barat. Keamanan negara Federasi Rusia yang merasa terancam dengan adanya intervensi Uni Eropa dan Amerika Serikat yang tergabung dalam organisasi NATO. Sebagai upaya diplomasi pemerintah Rusia telah mengirimkan surat tuntutan kepada NATO, salah satu poin penting yang ingin disampaikan adalah menolak ide bergabungnya Ukraina kedalam organisasi tersebut.

Pemerintah Rusia sendiri berulang kali menegaskan bahwa tidak akan ada pihak manapun yang akan diuntungkan jika terjadinya perang. Pernyataan tersebut juga sekaligus menjawab sikap politik Pemerintah Rusia yang pada akhir-akhir ini sedang melakukan latihan militer dikawasan perbatasan Rusia dan Ukraina. Latihan tersebut merupakan hak prerogative pemerintah Rusia karena diselenggarakan dalam wilayahnya sendiri (berbeda dengan negara-negara Barat yang mengirimkan pasukan militer jauh dari negara asalnya).

Kedua belah pihak yang pada akhirnya saling memberikan sanksi baik sanksi politik maupun ekonomi merupakan sebuah cerminan dari ikatan saling ketergantungan kedua belah pihak dalam upaya menjaga stabilitas politik dan ekonomi dinegaranya. Maka dalam perspektif ini penulis memiliki pandangan bahwa perang bukan merupakan solusi dari permasalahan yang sedang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Berita Satu, Inilah Kronologi Krisis Politik di Ukraina.,
<http://m.beritasatu.com/dunia/167380-inilah-kronologi-krisis-politik-di-Ukraina.html>, diakses pada 12 Februari 2022.
- BBC.com, *What does Russia want from Ukraine.*, <https://www.bbc.com/news/world-europe-56720589>. Diakses pada 17 Februari 2022.
- CNBC Indonesia.com, Dampak Ekonomi jika Rusia Melakukan Serangan ke Ukraina., <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220214095443-4-315109/ini-dampak-ekonomi-bila-rusia-benar-benar-serang-ukraina>. Diakses pada 18 Februari 2022.
- CNBC indonesia, kronologi konflik Rusia-Ukraina hingga ancaman perang dunia 3., <https://www.cnbcindonesia.com/news/202202170727-4-316018/kronologi-konflik-rusia-ukraina-hingga-ancaman-perang-dunia-3>, diunduh pada 18 februari 2022
- Dragneva, R. dan Wolczuk, K. (2016). *Between Dependence and Integration: Ukraine's Relations with Russia*. UK: Taylor & Francis Group., hlm 65.
- Kompas.com. Kenapa Rusia menyerang Ukraina, apa yang diincar Putin., <https://internasional.kompas.com/read/2022/01/26/200000970/kenapa-rusia-ukraina-perang-dan-apa-yang-diincar-putin?page=all>. Diunduh pada 18 Februari 2022.
- Media Indonesia.com. Referendum Krimea. Haqq, Syauqi Arinal. <https://m.mediaindonesia.com/opini/472554/ketegangan-rusia-ukraina-pendapat-dari-rusia>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2022
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1945). *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional.*, Hlm 6.